



PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*, PENGENDALIAN AKUNTANSI, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA SE-KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN

Lia Amelia^{a*}, Muhammad Hasan Ma'ruf^b, Suprihati^c

^a Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi, lia602465@gmail.com, ITB AAS Indonesia, Sukoharjo Jawa Tengah

^b Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi, hasan.stie.aas@gmail.com, ITB AAS Indonesia, Sukoharjo Jawa Tengah

^c Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi, suprihati4566@gmail.com, ITB AAS Indonesia, Sukoharjo Jawa Tengah

* Korespondensi

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of the application of good governance, accounting controls, and reporting systems on the performance accountability of village government agencies in the management of village funds throughout the Tanon Sub-district. This type of research is quantitative with a survey approach and data collection techniques through questionnaires. The population in this study comprises all village officials in the Tanon District of Sragen Regency, with a sample size of 80 respondents taken using the saturated sampling method. Data analysis techniques include descriptive statistical tests, validity tests, reliability tests, and classical assumption tests. For hypothesis testing, multiple linear regression tests, t-tests, F-tests, and coefficient of determination tests were used. The results of the study indicate that the implementation of good governance has a positive impact on the accountability of village government performance. Accounting control does not positively impact the accountability of government performance. Reporting systems do not positively impact the accountability of village government performance.

Keywords: *Good Governance, Accounting Control, Reporting System, Performance Accountability.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *good governance*, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa se-Kecamatan Tanon. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survei dan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, dengan jumlah sampel sebanyak 80 responden yang diambil menggunakan metode sampel jenuh. Teknik analisis data meliputi uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Untuk pengujian hipotesis, digunakan uji regresi linear berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa. Pengendalian akuntansi tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pelaporan tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa.

Kata kunci: *Good Governance, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja.*

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional”. Dengan Undang – Undang tersebut artinya desa mempunyai landasan hukum yang kuat untuk memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan, termasuk dana desa, dan kewenangan dalam membangun daerahnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Pembangunan desa menjadi prioritas pemerintah untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Dalam pembangunan desa dana yang digunakan adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada setiap desa di Indonesia sebagai upaya mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan pelayanan desa. Menurut Undang -Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, terdapat 7 sumber pendapatan desa yang perlu diketahui dan dipahami, diantaranya: Pendapatan Asli Desa, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Hibah dan Sumbangan yang tidak Mengikat, Pendapatan Desa Lainnya yang Sah.

Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa dialokasikan setiap tahun dari APBN dan didistribusikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah dan disalurkan ke rekening kas desa. Dalam peraturan ini tujuan disalurnya dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi desa, peningkatan pelayanan pasar, pengembangan sumber daya manusia, penguatan partisipasi masyarakat, dan mengurangi kesenjangan pembangunan.

Dana desa sangat penting untuk pemerintah desa karena menyediakan sumber pembiayaan utama untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dalam penggunaan dana desa masyarakat dilibatkan dalam musyawarah desa sesuai dengan prinsip good governance yaitu partisipasi untuk mengetahui semua kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kegiatan desa.

Good governance merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas segala tindakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Adanya dana desa juga dapat memunculkan masalah baru, yaitu ketidakpercayaan masyarakat dan kekhawatiran tentang pengelolaan dana desa. Masalah ini berkaitan dengan pengendalian akuntansi yang kurang melibatkan masyarakat cenderung kurang efektif dalam mencegah penyalahgunaan dana dan sistem pelaporan laporan keuangan pemerintah desa yang seharusnya bisa diakses oleh masyarakat namun tidak tersampaikan secara transparan.

Mardiasmo (2018) dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Pengendalian akuntansi yang bertujuan untuk memastikan setiap transaksi keuangan dicatat secara akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi penerapan akuntabilitas, diantaranya adalah pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundang – undangan, akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi, motivasi, dan kompetisi. Dengan adanya pengendalian akuntansi maka instansi pemerintah dapat mengontrol dan menilai seluruh aktivitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan instansi tersebut.

Pengendalian akuntansi dapat menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut telah ekonomis, efisien, dan efektivitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, ini merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Tercapainya indikator tersebut merupakan suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Maka semakin tinggi pengendalian akuntansi yang diterapkan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah semakin meningkat Rio, Henri, dan Salma, (2019). Pengendalian akuntansi yang baik memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dicatat secara akurat dan sesuai dengan standar, sehingga dapat meminimalkan kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan. Sistem pelaporan ialah laporan yang mencerminkan sistem pertanggung jawaban dari bawahan kepada atasan. Sistem pelaporan yang

bagus dibutuhkan supaya bisa mengawasi serta mengontrol kinerja manajerial di dalam menjalankan anggaran yang sudah diputuskan. Sistem pelaporan harus dilakukan dengan menyediakan beberapa informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan atau instansi pemerintah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Fenomena terkait dengan pengelolaan dana desa adalah terdapat beberapa desa di Indonesia yang sering kali mengalami permasalahan dalam pencairan dana desa dikarenakan kurangnya akuntabilitas pemerintah desa. Permasalahan yang mendasari kurangnya akuntabilitas pemerintah desa adalah dalam praktiknya pemerintah desa sering mengalami keterlambatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Permasalahan ini mempengaruhi proses pencairan dana desa yang diketahui dokumen penting yang harus dilengkapi dalam proses pencairan dana desa seperti, dokumen RKPDes, dokumen APBDesa tahun berjalan, Rencana Penggunaan Uang (RPU), SPJ kegiatan dan dokumen pendukung lainnya Ika dan Prayino Basuki, (2019). Dengan fenomena diatas menandakan adanya masalah pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa.

Akuntabilitas menurut Undang – Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dalam penjelasan pasal 24 huruf g, Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan perundang – undangan. Sedangkan menurut paper yang dipaparkan oleh Kumorotomo (2013), menyatakan bahwa akuntabilitas dimaknai sebagai ukuran kesesuaian antara pelayanan publik dengan norma masyarakat, dengan menunjukkan capaian yang mendukung kebutuhan masyarakat. Pentingnya akuntabilitas kinerja dilakukan untuk meminimalisir adanya permasalahan yang melanda organisasi. Akuntabilitas menjadi prinsip penting dari penerapan good governance dalam bidang administrasi publik. Penerapan good governance dalam suatu OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dinilai baik apabila memenuhi prinsip – prinsip dasar good governance, diantaranya yakni partisipasi, transparansi, kepastian hukum, cepat dan tanggap, berorientasi pada kepentingan, keadilan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dan visi strategis.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Israr & Syofyan, (2022) hasil dari penerapan good governance sama – sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan menurut Hidayat et al., (2021) hasil penerapan good governance tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian (Harianto et al., 2021) menghasilkan pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan menurut (Elsa Pinika Putri Purba & Kusmilawaty Kusmilawaty, 2024) menghasilkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian (Yulisanti & Furqani, 2023) menghasilkan dari sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Riharjo, (2017) yang dijelaskan di agency theory, dimana dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi Amanah dalam hal ini masyarakat yang memiliki hak dan kewenangan untuk memintah pertanggungjawaban. Akuntabilitas berarti siapapun yang diberi amanah, kekuasaan, atau sumber daya harus dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan bagaimana amanah itu digunakan.

1.2 Akuntabilitas Kinerja

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah agar mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi, misi dan tujuan organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran periodik. Dalam peraturan ini tertulis bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat diketahui indikatornya yaitu : 1) perencanaan kinerja, 2) kompensasi, 3) capaian kinerja, 4) pelaporan kinerja, 5) penilaian domestic, 6) pemanfaatan informasi kapabilitas. Akuntabilitas kinerja berarti bentuk pertanggung jawaban atas hasil kerja yang dicapai oleh individu, organisasi, atau instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

1.3 Good Governance

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrative menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. (Hidup, 2017). Menurut UNDP arti good governance mengandung pengertian nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, berdayaguna dan berhasil dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan, serta aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Untuk dapat menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan konsep Good Governance, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami prinsip – prinsip yang ada didalamnya. Menurut World Bank, priinsip – prinsip Good Governance diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorintasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas serta visi strategis.

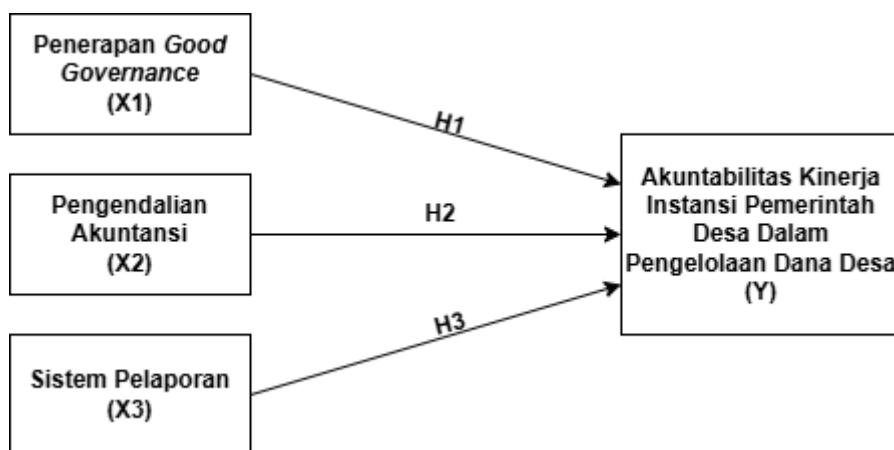
2.4 Pengendalian Akuntansi

Pengendalian (control) mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksana. Untuk mencapai tujuan telah ditetapkan bagi organisasi, pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat diambil keputusan yang sesuai rencana. Pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. (Auzan et al., 2017). Widaryanti & Pancawardani, (2020) pengendalian akuntansi merupakan suatu perencanaan, prosedur, dan sitem pelaporan yang bersangkutan dengan penjagaan harta atau asset organisasi. Pengendalian akuntansi yang kuat akan menghasilkan data dan informasi keuangan yang handal dan dapat mencegah terjadinya kecurangan dan kesalahan yang merugikan organisasi serta menurunkan kualitas kinerja.

2.5 Sistem Pelaporan

Wea (2021) sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Menurut Indra Bastian, 2010 “pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja.” (Febriani, 2023). Sistem pelaporan bukan hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga berfungsi sebagai pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dna akuntabilitas kinerja yang dapat dipercaya.

2.6 Kerangka Pemikiran



Dilandaskan kerangka pemikiran diatas diperoleh hipotesis yakni:

H1 : Penerapan *good governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

H2 : Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

H3 : Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian merupakan perangkat desa se-Kecamatan Tanon. Jumlah populasi sebanyak 80 orang perangkat desa di Kecamatan Tanon. Jumlah sampel memakai metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel dimana peneliti secara sengaja memilih individu atau kelompok berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap paling relevan atau informatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner melalui skala penilaian yaitu skala likert. Pengolahan data menggunakan SPSS versi 23. Metode analisis yang digunakan Analisis Karakteristik Responden, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Kelayakan Model (Uji F). Pengujian hipotesis menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Parsial (Uji t), dan Uji Koefisien Determinasi (R^2).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang akan diamati dalam perangkat desa di Kecamatan Tanon ini adalah menurut jenis kelamin responden lebih dominan perempuan sebanyak 45 orang. Menurut usia responden lebih unggul umur >45 tahun yaitu sebanyak 25 orang. Menurut tingkat pendidikan lebih dominan Pendidikan SMA/SMK sederajat yaitu 49 orang.

4.2 Uji Validitas

Uji validitas yang terdiri dari 8 butir pertanyaan variabel pengendalian akuntansi dan akuntabilitas kinerja, 10 butir pertanyaan variabel penerapan *good governance* dan sistem pelaporan, mampu disimpulkan bahwasannya seluruh butir pertanyaan memenuhi kriteria validitas karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel 0,2199. Seluruh pertanyaan dinyatakan valid serta mampu dipergunakan pada penelitian.

4.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini dapat ditemukan nilai *cronbach alpha* bagi setiap variabel. Nilai *cronbach alpha* yang diperoleh dari setiap variabel melebihi angka 0,60, maka variabel yang digunakan mampu dianggap reliabel dan mempunyai tingkat reliabilitas yang baik.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,52989482
	Most Extreme Differences	
	Absolute	0,092
	Positive	0,084
	Negative	-0,092
Test Statistic		0,092
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,092 ^c

Sumber: Data primer SPSS diolah 2025

Hasil data output SPSS di atas dapat dilihat uji normalitas menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* bernilai 0,092 lebih dari 0,05, oleh karena itu mampu dinyatakan berdistribusi normal, sehingga data yang digunakan pada penelitian ini layak dipergunakan.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Akuntabilitas Kinerja			Tidak terdapat Multikolinearitas
Penerapan <i>Good Governance</i>	0,200	5,010	Tidak terdapat Multikolinearitas
Pengendalian Akuntansi	0,267	3,749	Tidak terdapat Multikolinearitas

Sistem Pelaporan 0,205 4,880 Tidak terdapat Multikolinearitas
 Sumber : Data primer SPSS diolah 2025

Hasil uji multikolinearitas tabel variabel penerapan *good governance*, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan memiliki nilai *tolerance* 0,200, 0,267, dan 0,205 serta nilai VIF 5,10, 3,749, dan 4,4880. Disimpulkan tidak ada multikolinearitas karena nilai *tolerance* > 0,10 serta nilai VIF < 10.

4.4.3 Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig	Standar	Keterangan
Akuntabilitas Kinerja	0,224	> 0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas
Penerapan <i>Good Governance</i>	0,484	> 0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas
Pengendalian Akuntansi	0,380	> 0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas
Sistem Pelaporan	0,993	> 0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber : Data primer SPSS diolah 2025

Hasil uji heterokedastisitas bernilai signifikansi > 0,05 maka, heterokedastisitas tidak timbul pada variabel yang diajukan dalam penelitian

4.5 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model	F hitung	F tabel	Sig	Keterangan
<i>Regression Residual</i>	16,704	2.724944	0,000	Layak digunakan

Sumber : Data primer diolah 2025

Hasil uji F dengan F hitung sebesar 16,704 > F tabel 2,724944 yang bernilai signifikansi 0,000 < 0,0005 artinya variabel penerapan *good governance*, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan secara simultan membawa pengaruh signifikan pada akuntabilitas kinerja atau layak digunakan.

4.6 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>	
	B	<i>Std. Error</i>
(Constant)	15,052	3,617
Penerapan <i>Good Governance</i>	0,348	0,075
Pengendalian Akuntansi	0,078	0,128
Sistem Pelaporan	0,038	0,063

Sumber : Data primer SPSS diolah 2025

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 15,052 + 0,348X_1 + 0,078X_2 + 0,038X_3 + e$$

- Nilai konstanta sebesar 15,052 artinya tanpa dipengaruhi oleh variabel apapun atau penerapan *good governance*, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan maka akuntabilitas kinerja sebesar 15,052.
- Koefisien regresi variabel penerapan *good governance* (X1) adalah 0,348. Adanya tanda positif bila penerapan *good governance* naik satu satuan melalui asumsi variabel lainnya konstan, jadi akuntabilitas kinerja naik 0,348 dan sebaliknya.
- Koefisien regresi untuk variabel pengendalian akuntansi (X2) adalah 0,078. Adanya tanda positif membuktikan apabila tingkat pendapatan naik satu satuan melalui asumsi lainnya konstan, jadi akuntabilitas kinerja naik 0,078 dan sebaliknya.
- Koefisien regresi untuk variabel sistem pelaporan (X3) adalah 0,038. Adanya tanda positif menyatakan apabila sistem pelaporan naik satu satuan melalui asumsi variabel lainnya konstan, jadi akuntabilitas kinerja naik 0,038 dan sebaliknya.

4.7 Uji Koefisien Determinasi/Uji R²

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,630 ^a	0,397	0,374	2,565

Sumber : Data primer SPSS diolah 2025

Pengaruh Penerapan Good Governance, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen (Lia Amelia)

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) nilai koefisien determinasi *Adjusted R Square* bernilai 0,374. Artinya variabel penerapan *good governance*, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan memberikan kontribusi pengaruh pada variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa senilai 37,4% sisanya 62,6% ($100\% - 37,4\%$) dijelaskan variabel lain yang tidak ada pada penelitian ini.

4.8 Uji Parsial/Uji t

Hipotesis	Variabel	t tabel	t hitung	Sig.	Status
H1	X1 → Y	1,9917	4,643	0,000	Diterima
H2	X2 → Y	1,9917	0,699	0,544	Ditolak
H3	X3 → Y	1,9917	0,546	0,549	Ditolak

Sumber : Data primer SPSS diolah 2025

4.9 Hasil Penelitian

4.9.1 H1 : Penerapan *Good Governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa.

Pengujian hipotesis yang sudah dilangsungkan, didapat hasil bahwasannya variabel penerapan *good governance* (X1) bernilai koefisien t hitung > t tabel yakni $4,643 > 1,9917$ serta signifikansi $0,000 < 0,05$. Oleh sebab itu, mampu disimpulkan bahwasannya variabel penerapan *good governance* membawa pengaruh positif serta signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa. Dengan adanya penerapan *good governance*, dalam pengelolaan dana desa perangkat desa memiliki kewajiban kepada masyarakat atas segala tindakan yang dijalankan oleh pemerintah desa. Penerapan *good governance* secara langsung memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik dan efisien karena perangkat desa tahu bahwa setiap kegiatan yang dilakukan membutuhkan pengeluaran yang dirinci serta diperiksa dan dipertanggung jawabkan.

4.9.2 H2 : Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa.

Pengujian hipotesis yang sudah dilangsungkan didapat hasil bahwasannya variabel pengendalian akuntansi (X2) bernilai koefisien t hitung < t tabel yakni $0,699 < 1,9917$ serta signifikansi $0,544 > 0,05$. Oleh sebab itu, mampu disimpulkan bahwasannya variabel pengendalian akuntansi membawa pengaruh negatif serta membawa pengaruh tidak signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa. Sehingga, hipotesis H2 ditolak. Ketidaksignifikan pengendalian akuntansi kemungkinan disebabkan oleh faktor perangkat desa kurang memahami terkait sistem akuntansi dan pemerintah desa belum menggunakan sistem keuangan secara optimal dalam melakukan pencatatan secara manual.

4.9.3 H3 : Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa.

Pengujian hipotesis yang sudah dilangsungkan didapatkan hasil bahwasannya variabel sistem pelaporan (X3) bernilai koefisien t hitung $0,546 < 1,9917$ serta signifikansi $0,549 > 0,05$. Oleh sebab itu mampu disimpulkan bahwasannya variabel sistem pelaporan membawa pengaruh negatif serta membawa pengaruh tidak signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa. Sehingga, Hipotesis H3 ditolak. Ketidaksignifikan sistem pelaporan kemungkinan disebabkan oleh faktor laporan yang disusun hanya untuk memenuhi kewajiban administrative bukan sebagai sarana pertanggungjawaban dan tidak ada mekanisme untuk menindaklanjuti laporan dengan tindakan atau perbaikan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh penerapan *good governance*, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa se-Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, maka dapat disimpulkan penerapan *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa se-Kecamatan Tanon.

Pengendalian akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa se-Kecamatan Tanon. Sistem pelaporan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Penerapan *good governance* memotivasi perangkat desa untuk bekerja lebih baik dan efisien dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Pengendalian

akuntansi dapat meningkatkan melalui sistem akuntansi dan sistem keuangan secara optimal dalam melakukan pencatatan. Sistem pelaporan dapat ditingkatkan sebagai sarana pertanggungjawaban untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

SARAN

Menurut analisis dan kesimpulan penulis memberikan saran agar menambah pelatihan mengenai sistem akuntansi, menerapkan sistem keuangan Siskeudes dan bisa mendorong bahwa laporan keuangan bukan sekedar tugas administrasi tetapi alat refleksi dan perbaikan kinerja. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengkolaborasi dengan menambah beberapa variabel dan objek penelitian bisa dikembangkan bukan hanya di Pemerintah desa tetapi bisa pemerintah Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ardiana, N. N., Prabawati, N. P. A., & Wijaya, K. A. S. (2024). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi). *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(4), 20–31.
- [2] Auzan, R. H., Nasir, A., & SilaFlahi, S. P. (2017). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan penerapan akuntabilitas keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (akip). *JOM Fekon*, 4(1), 1122–1136.
- [3] Ekonomi, J., & Akuntansi, M. (2024). *Neraca Neraca*. 1192, 304–317.
- [4] Elsa Pinika Putri Purba, & Kusmilawaty Kusmilawaty. (2024). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. *Akuntansi*, 3(1), 304–319.
- [5] Febriani, D. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Emperis Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo).
- [6] Fitriyani, N., & Herawati, H. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah). *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 2(2), 19.
- [7] Ghozali, I. (2018). *Book_2018_Ghozali.pdf* (p. 30).
- [8] Harianto, D., Kennedy, & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran , Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Akip) (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(1), 122–139.
- [9] Hidayat, T., Putri, A. M., & Murialti, N. (2021). Pengaruh Good Governance, Kompetensi, dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi: Optimalisasi Zakat Dan Wakaf Dalam Membangun Ekonomi Indonesia*, 1, 87–97.
- [10] Hidayattullah, A., & Herdjiono, I. (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD di Merauke. *Jurnal Akuntansi & Investasi Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank*, 978–979.
- [11] Hidup, D. L. (2017). Pengertian, Prinsip dan Penerapan Good Governance di

Pengaruh Penerapan Good Governance, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen (Lia Amelia)

Indonesia.

- [12] Israr, N. H., & Syofyan, E. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(4), 686–697.
- [13] Meliana, D., Suwondo, S., & Burhany, D. I. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(1), 43–50.
- [14] Rahman, A., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Journal of Management*, 4(2), 257–270.
- [15] Riharjo. (2017). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(9), 1–22.
- [16] Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36.
- [17] Tanon, K., & Angka, D. (2020). *Kecamatan Tanon Dalam Angka 2020* | i.
- [18] Widaryanti, W., & Pancawardani, N. L. (2020). Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 15(2), 477–492.
- [19] Yulisanti, & Furqani, A. (2023). Pengaruh Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Dengan Kepatuhan Regulasisebagai Variabel Moderasi. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 4(2), 58–68.